



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)



KANTOR CAMAT ILE BOLENG

TAHUN : 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang maha Kuasa, karena atas berkat dan karuniaNya serta dukungan dari semua unsur Aparatur Kecamatan Ile Boleng maka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ile Boleng tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

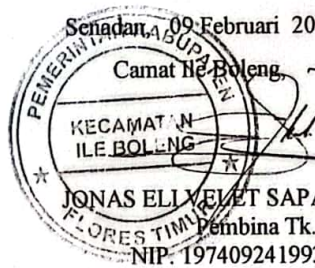
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kecamatan Ile Boleng tahun 2019 merupakan laporan yang dibuat setiap tahun sebagai bahan evaluasi Camat dalam mengikuti Rapat Kerja Daerah baik tingkat kabupaten maupun propinsi.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Ile Boleng tahun 2020 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Ile Boleng pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas segala partisipasi dalam menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan Ile Boleng ini menjadi acuan dalam tugas dan dan fungsi pelayanan kita kepada masyarakat.

Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Terima kasih .

Sehadan, 09 Februari 2021.
Camat Ile Boleng,

JONAS ELI MELET SAPAKOLY, S.SOS
Pembina Tk. I
NIP. 197409241993111003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Bab.I : Pendahuluan.....	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.3. Data Umum Daerah.....	3
Bab. II : Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	6
Bab. III : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.....	9
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	9
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	14
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya.....	14
Bab. IV. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan.....	15
Bab. V. Penutup	
a. Kesimpulan.	16
b. Saran.	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

1. Undang-undang no. 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tkt. I Bali, NTB, dan NTT (LNRI Tahun 1958, No. 122, tambahan LNRI No. 1655).
2. Undang – Undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 no. 126, Tambahan LNRI no. 4438).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 No.244, Tambahan LNRI No. 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP pengganti UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2014 no. 26, Tamabahan LNRI no.5589).
4. Undang-Undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI tahun 2014 no. 292, Tambahan LNRI No. 5061).
5. PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 No. 165, Tambahan LNRI No. 4593).
6. PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI tahun 2007 no. 82, Tambahan LNRI no.4737).
7. PP no.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (LNRI tahun 2008 no. 127).
8. PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Perda Kabupaten Flores Timur no. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur (LD tahun 2016 no. 11 Tambahan LD no.0140).
10. Perbup. Flotim no. 15 tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian tugas dan wewenang Bupati Flores Timur kepada Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten flores Timur.
11. Perbup. Flores Timur no. 31 tahun 2017 tentang Uraian tugas Kecamatan.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka Penyusunan LKPJ sebagai Pencapaian Kinerja Laporan, maka semua ini tidak terlepas dari Visi Kepala Daerah yakni : **"Flores Timur Sejahtera dalam bingkai Desa Membangun Kota Menata"**, dengan 5 Misi yaitu :

1. Selamatkan Orang Muda
2. Selamatkan Infrastruktur
3. Selamatkan tanaman Rakyat
4. Selamatkan Laut
5. Reformasi Birokrasi

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.
Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :
 1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur:** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
 2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur :** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
 3. **Selamatkan Tanaman Rakyat flores Timur:** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

4. **Selamatkan Laut Flores Timur** : dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** : dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government.
Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Ile Boleng berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai akhir dalam Pencapaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka kondisi terakhir tidak maksimal pencapaian karena dampak Virus Corona 19 yang melanda, khususnya di Kabupaten Flores Timur.

1.3. Data Umum Daerah

1. Data Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 08 Tahun 2004, wilayah Ile Boleng yang sebelumnya berstatus sebagai perwakilan kecamatan Adonara Timur ditetapkan sebagai kecamatan definitif dengan nomenklatur Kecamatan Ile Boleng sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi 21 (dua puluh satu) Desa, yaitu :

Secara Geografis batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gunung Boleng
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Boleng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Witiama
- sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Adonara Timur.

Keadaan topografi bervariasi seperti daratan lembah perbukitan dan lereng gunung serta tinggi dari permukaan laut terdiri dari :

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|
| 1. | 0 – 5 m | : 8,74 km ² |
| 2. | 5 – 25 m | : 16 km ² |
| 3. | 25 – 100 m | : 15,20 km ² |
| 4. | 500 - 100 m | : 19 km ² |
| 5. | 100 – 1500 m | : 13 km ² |
| 6. | 1500m | : 23 km |
| 7. | Kawah Gunung Ile Boleng | : 1.596m |

Kecamatan Ile Boleng beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 400-500 mm/tahun

Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan Layanan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Ile Bolemg didukung dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kecamatan Ile Boleng baik instansi Vertikal otonom dan BUMN/BUMD yang ditempatkan pada wilayah termasuk penempatan personil PNS maupun Tenaga Kontrak Daerah serta Pihak Keamanan. Selama ini kerjasama yang terjalin cukup baik.

2. Jumlah Penduduk

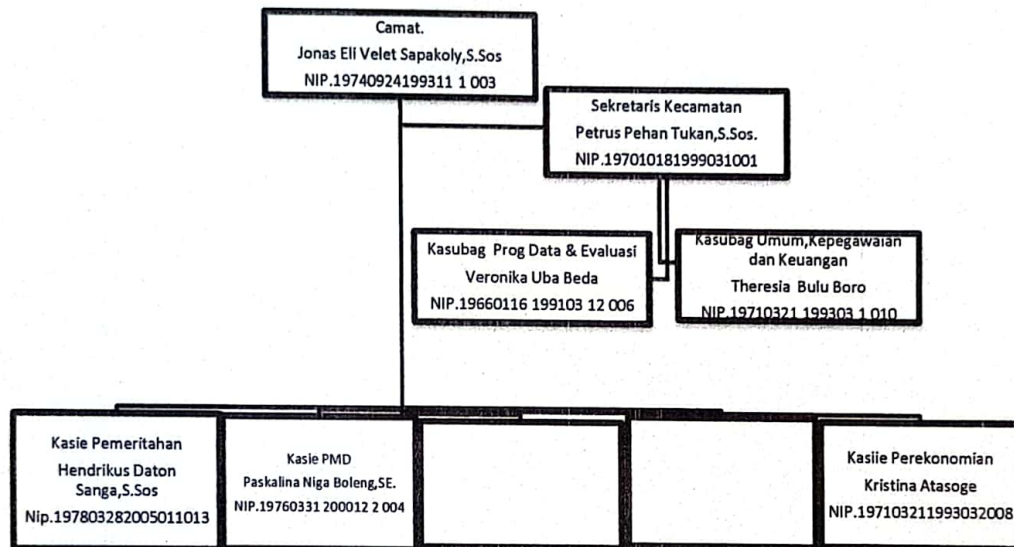
No.	Nama Desa	Luas Wilayah	Jumlah KK			Jumlah Penduduk			Ketr.
			L	P	Jlh	L	P	Jlh	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bedalewun	2.00	118	59	177	241	267	508	
2	Nihaone	2.34	161	64	225	395	457	852	
3	Lewoblolong	1.11	72	52	124	180	218	398	
4	Bungalawan	2.86	116	66	182	249	333	582	
5	Lamawolo	5.07	221	117	338	543	506	1049	
6	Helanlangowuyo	5.70	502	130	632	1112	1166	2278	
7	Lewopao	4.65	285	171	456	743	864	1607	
8	Gayak	1.44	64	28	92	128	143	271	
9	Boleng	2.86	290	22	312	443	661	1104	
10	Neleblolong	1.29	95	60	155	235	238	473	
11	Duablolong	2.11	134	103	237	321	392	713	
12	Lewokeleng	3.02	110	39	149	237	269	506	
13	Nelelamawangi	1.79	76	33	109	188	211	399	
14	Harubala	2.20	148	91	239	320	392	712	
15	Nelelamadike	2.14	210	151	361	485	545	1030	
16	Lamabayung	2.53	189	77	270	481	483	964	
17	Lewat	2.00	121	27	148	215	225	440	
18	Dokeng	2.23	63	21	84	161	168	329	
19	Bayuntaa	1.01	85	59	144	215	239	454	
20	Nobo	1.44	119	63	182	262	269	531	
21	Nelelamawangi II	1.60	92	40	132	183	217	400	
	JUMLAH		3271	1473	4744	7337	8263	15600	

3. Jumlah PNS

Jumlah P N S pada Kantor Camat Ile Boleng adalah : 17 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Struktural Eselon III.a : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon III.b : 1 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV.a : 3 orang
- Pejabat Struktural Eselon IV.b : 2 orang
- Fungsional Umum : 10 orang

Struktur Organisasi Kepegawaian



Dalam tahun 2020, ada 2 orang Pejabat Eselon IV.a yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Kesos Pelum dan Trantib Pensiun sehingga kedua Seksi tersebut masih lowong.

Bab. II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ile Boleng tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Bab. II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Ile Boleng tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Program/Kegiatan	DPA Awal	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	Realisasi	Sisa Pagu
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	266.195.500	252.991.500	- 13.204.000	251.591.500	1.400.000
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	-	900.000	-
	-Peny.jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	-
	-Penyed.Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	2.800.000	2.800.000	-	1.400.000	1.400.000
	-Penyed.Jasa Administrasi Keuangan	26.400.000	26.400.000	-	26.400.000	-
	-Penyed.Jasa kebersihan kantor	1.691.000	1.191.000	- 500.000	1.191.000	-
	-Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.710.500	8.000.500	- 5.710.000	8.000.500	-
	-Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan	14.500.000	10.500.000	- 4.000.000	10.500.000	-
	-Penyed.Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	2.952.000	1.000.000	- 1.952.000	1.000.000	-
	-Penyediaan Makanan dan Minuman	20.500.000	10.000.000	- 10.500.000	10.000.000	-
	-Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	74.142.000	83.600.000	9.458.000	83.600.000	-
	-Penyed.Jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	96.600.000	96.600.000	-	96.600.000	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.400.000	15.500.000	- 7.000.000	15.500.000	-
	-Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan/dinas	21.500.000	-	- 21.500.000	-	-
2	-Penhgadaan Peralatan/Gedung Kantor	23.400.000	-	- 23.400.000	-	-
	-Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	8.000.000	6.000.000	- 2.000.000	6.000.000	-
	-Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/operasional	10.500.000	7.500.000	- 3.000.000	7.500.000	-
	-Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	4.000.000	2.000.000	- 2.000.000	2.000.000	-
	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.371.500	13.371.500	-	13.371.500	-
3	-Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.371.500	13.371.500	-	13.371.500	-

4	Program Koordinasi Pemerintahan,Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	107.400.000	98.900.000	-	8.500.000	76.350.000	22.550.000
	- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	15.350.000	15.350.000	-	-	15.350.000	-
	-Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	70.400.000	70.400.000	-	-	47.850.000	22.550.000
	-Pendampingan dan Pengelolaan Keuangan Desa	21.650.000	13.150.000	-	8.500.000	13.150.000	-
	Jumlah	454.367.000	380.763.000	-	28.704.000	356.813.000	23.950.000

Bab. III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam RKA tahun 2020 ditetapkan pada APBD Kabupaten Flores Timur terdapat 4 (empat) Program dan 20 Kegiatan.

Namun karena adanya wabah Virus Corona 19, maka kegiatan Belanja Modal yaitu: Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dipangkas dengan tujuan membantu penanganan wabah Virus Corona 19, sehingga tersisa 18 kegiatan dengan capaian pelaksanaannya seperti terlihat pada table berikut :

4	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat	107.400.000	98.900.000	- 8.500.000	76.350.000	22.550.000
	- Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	15.350.000	15.350.000	-	15.350.000	-
	-Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	70.400.000	70.400.000	-	47.850.000	22.550.000
	-Pendampingan dan Pengelolaan Keuangan Desa	21.650.000	13.150.000	- 8.500.000	13.150.000	-
	Jumlah	454.367.000	380.763.000	- 28.704.000	356.813.000	23.950.000

Bab. III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERITAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam RKA tahun 2020 ditetapkan pada APBD Kabupaten Flores Timur terdapat 4 (empat) Program dan 20 Kegiatan.

Namun karena adanya wabah Virus Corona 19, maka kegiatan Belanja Modal yaitu: Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dipangkas dengan tujuan membantu penanganan wabah Virus Corona 19, sehingga tersisa 18 kegiatan dengan capaian pelaksanaannya seperti terlihat pada table berikut :

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No.	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg.	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kantor Camat Ile Boleng	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminnistrasi Pemerintahan		Pelayanan Administrasi Perkantoran		252.991.500		251.591.500	1. Keterbatasan Anggaran	1. Mengusulkan penambahan anggaran ditahun brikutnya.
				Penyed.Jasa Surat Menyurat	150 lbr	900.000	150 lbr	900.000	2. Pagu Anggaran Tidak diimbangi dengan luas wilayah dan jumlah desa	2. Mengusulkan kepada tim anggaran Kabupaten Flores Timur, agar dalam penetapan anggaran perlu juga mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah desa.
				Penyed.Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000		
				Penyed.Jasa Pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional	8 unit	2.800.000	8 unit	1.400.000		
				Penyed. Jasa adm. Keuangan	4(1 th)	26.400.000	4(1 th)	26.400.000		
				Penyed.jasa kebersihan kantor	19 jenis	1.191.000	19 jenis	1.191.000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	37 jenis	8.000.500	37 jenis	8.000.500		

	Kantor Camat Ile Boleng	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminnistrasi Pemerintahan		Penyed.Barang cetak dan penggandaan	28000 (1 th)	10.500.000	28000 (1 th)	10.500.000			
				Penyed.Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 jenis	1.000.000	16 jenis	1.000.000			
				Penyed.makanan dan minuman	500 OM (1 th)	10.000.000	500 OM (1 th)	10.000.000			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 paket	83.600.000	1 paket	83.600.000			
				Penyed.jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	7 org /bl/th	96.600.000	7 org /bl/th	96.600.000			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		15.500.000		15.500.000			
				Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	2 buah	6.000.000	1 paket	6.000.000			
				Pemeliharaan rutin berkala kend.dinas/operasion al	8 buah	7.500.000	8 buah	7.500.000			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2 jenis	2.000.000	2 jenis	2.000.000			

Kantor Camat Ile Boleng	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Adminnistrasi Pemerintahan	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		13.371.500		13.371.500			
		Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iskhtisar realisasi kinerja SKPD	6 jenis	13.371.500	6 jenis	13.371.500			
		Program koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat		98.900.000		76.350.000			
		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	15.350.000	1 kali	15.350.000			
		Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Kemasyarakatan	7 org/ 2 jenis	70.400.000	7 org/ 2 jenis	47.850.000			
		Pendampingan dan Pengelolaan Keuangan Desa		13.150.000	0	13.150.000			
		Jumlah		380.763.000		356.813.000			

3.1.1. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Program .

Kecamatan Ile Boleng sebagaimana Kecamatan pada umumnya di Kabupaten Flores Timur memiliki 4 (empat) Program.

Keempat program tersebut terdapat kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program apabila ditinjau dari sisi kuantitatif Pagu Anggaran Program dengan Kegiatan.

Akan tetapi ditinjau dari sisi kualitatif Kegiatan tentu masih terdapat kekurangan karena Pagu Anggaran Program tidak mencukupi membiayai kegiatan-kegiatan dengan berbagai dinamika permasalahan yang ada di wilayah.

Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tabel 3.1. di atas maka dapat dianalisa kesesuaian antara Kegiatan dengan target kinerja Program untuk tahun 2020 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target kinerja anggaran : Rp. 252.991.500

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 252.991.500

Rasio pencapaian : 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target kinerja anggaran : Rp. 15.500.000

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 15.500.000

Rasio pencapaian : 100 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target Kinerja Anggaran : Rp. 13.371.500

Realisasi Pelaksanaan Program : Rp. 13.371.500

Rasio Pencapaian : 100 %

4. Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

Target Pelayanan Anggaran : 98.900.000

Realisasi Program Kegiatan : 76.350.000

Rasio Pencapaian : 77 %

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya.

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)

BAB. IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

(Diisi oleh OPD yang melaksanakan tugas pembantuan)

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Boleng ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng selama Tahun 2020 kepada Para Stakeholder di Kabupaten Flores Timur, untuk dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dalam menilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ile Boleng, demi perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, hal-hal yang lebih berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain:

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good governance*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya. optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2020 sudah dirasa mengarah kepada tingkatandiperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna tercipta suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
3. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Governance (Penegakah Hukum, Akuntabilitas dan Professional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
4. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
5. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini tercermin dari kecilnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

B. Saran

Memperhatikan isi Laporan ini, maka kendala-kendala yang dihadapi tersebut serta upaya/langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ile Boleng sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi lainnya, antara lain:

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada SKPD Kecamatan Ile Boleng;
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur pelaksana Program dan Kegiatan dengan mengikutsertakan pegawai pada Diklat, Bimtek dan sebagainya;
3. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external SKPD;
4. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
5. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Optimalisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan.
7. Diperlukan merehabilitasi gedung Kantor Camat yang saat ini terasa kurang memadai lagi karena tidak dapat menampung para pegawai dalam melaksanakan tugas. Atau dilakukan perluasan gedung agar semua pegawai yang bekerja di kantor camat dapat tertampung dalam ruang kerja dan nyaman dalam melaksanakan aktivitas.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tingkat Kecamatan Ile Boleng ini dibuat dan tentunya masih ada kekurangan yang harus di sempurnakan pada masa yang akan datang. Untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan/usul saran dan pertimbangan dari Bapak Bupati untuk perbaikan dan kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bagian dari Laporan yang tergabung dengan SKPD lainnya.

Sekian dan terima kasih.

